

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara besar dengan banyak potensi yang dapat dikembangkan. Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagian dari kekayaan sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagian lagi masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai kendala seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Jika Pemerintah mengelola sumber daya tersebut dengan baik, potensi sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri secara otonom.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 “Tentang Pemerintah Daerah” menyatakan bahwa Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah, mengharuskan semua pihak untuk melakukan perubahan dan memahami tanggung jawab serta kewenangan

Pemerintah Daerah. Menurut Kuncoro Thesaurianto (2007), salah satu alasan pengelolaan daerah adalah pembangunan daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Dengan demikian, munculnya otonomi daerah mengandung maksud untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola keuangannya dengan lebih mandiri. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai setiap daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan Pertumbuhan Ekonomi menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini berdasarkan firman Allah Swt. melalui Surat Hud ayat 61: *“Dia telah menciptakanmu dari dan menjadikanmu pemakmurnya”*. Dapat diartikan bahwa, Allah Swt. menciptakan kita untuk menjadi kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. ‘Pemakmuran bumi’ mengandung makna tentang Pertumbuhan Ekonomi, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada seorang gubernur di Mesir, dia mengatakan: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak. Karena, pajak itu sendiri hanya dapat dioptimalkan oleh pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi akan menghancurkan negaranya”*.

Islam mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai perkembangan berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang tepat yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Peningkatan faktor-faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut mengandung komoditas

yang terbukti merugikan produksi dan dapat membahayakan manusia. Pertumbuhan mencakup aspek yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi kehidupan manusia, tetapi juga aspek hukum, social, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan dasar-dasar keadilan social, kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia. Islam membutuhkan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan (*equity*) secara simultan. Karena, Pertumbuhan Ekonomi tidak mencerminkan kesejahteraan yang menyeluruh. Terutama, ketika pendapatan dan faktor-faktor produksi terpusat pada sekelompok kecil masyarakat maka dari itu pemerataan juga dibutuhkan.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan komponen yang penting bagi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Pertumbuhan Ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembangunan Ekonomi dengan membentuk model kemitraan dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan di daerah. Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai proses yang mengarah pada peningkatan jangka panjang dalam pendapatan per kapita penduduk suatu Negara. Pertumbuhan suatu daerah biasanya dinyatakan dalam tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap Kabupaten/Kota sangat bervariasi tergantung pada karakteristik Kabupaten/Kota tersebut.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki peran penting bagi Perekonomian Indonesia. Berdasarkan sisi perekonomian secara makro, Jawa Barat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata sebesar 7,33% (berdasarkan harga konstan 1993) dalam periode prakritis (1993-1997). Kemudian sesudah masa prakritis (2001-2003), pertumbuhan Jawa Barat secara berturut-turut sebesar 3,98%, 3,93% dan 4,54%.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pulau Jawa Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	(Seri 2010) Produk Domestik Regional Harga Konstan 2010 (milyar rupiah)					
	DKI Jakarta	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Banten	DI Yogyakarta
2018	1.735.208,29	1.563.441,82	1.419.624,14	941.091,14	433.782,71	98.024,01
2019	1.836.240,55	1.649.895,64	1.490.959,69	991.516,54	456.620,03	104.485,46
2020	1.792.403,43	1.611.507,78	1.453.380,72	965.225,71	441.138,98	101.683,52
Total	5.363.852,27	4.824.845,24	4.363.964,55	2.897.833,39	1.331.541,72	304.192,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi

Berdasarkan tabel 1.1. PDRB atas Harga Konstan 2010 menurut Pulau Jawa tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta dengan persentase pertumbuhan sebesar 0.04%. Sedangkan, pertumbuhan terendah terjadi pada Provinsi Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan persentase pertumbuhan sebesar 0.02%.

Pemerintah Daerah Jawa Barat menghadapi perlambatan Pertumbuhan Ekonomi akibat adanya pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020. Dalam data BPS Jawa Barat, disebutkan sekitar -2,52% perekonomian di Jawa Barat sedikit

menyusut selama masa pandemi. Data ini dibandingkan dengan data pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Pada sektor lain di Jawa Barat, perekonomian masih menunjukkan angka yang positif. Diantaranya adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah serta limbah dan daur ulang.

Untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi, setiap daerah membutuhkan pendanaan yang tidak hanya bersumber berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga berdasarkan pendapatan daerah itu sendiri. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai setiap kegiatannya. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan desentralisasi daerah. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) & Bagi Hasil Pajak.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah”. Di dalamnya menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan desentralisasi daerah. Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antar daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

**Tabel 1.2. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Wilayah Jawa Barat	Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu)		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	2,149,817,107	1,967,815,290	1,947,251,242
Kab. Bandung Barat	1,126,707,364	1,002,493,222	1,044,339,297
Kab. Bekasi	1,219,550,987	1,105,266,422	1,096,895,278
Kab. Bogor	2,034,853,421	1,849,796,843	1,924,846,835
Kab. Ciamis	1,212,593,846	1,112,349,718	1,135,769,046
Kab. Cianjur	1,627,020,432	1,472,420,591	1,532,487,814
Kab. Cirebon	1,591,291,632	1,417,094,602	1,452,822,229
Kab. Garut	1,837,050,436	1,663,193,753	1,665,908,667
Kab. Indramayu	1,418,027,397	1,297,006,125	1,325,416,407
Kab. Karawang	1,325,136,164	1,211,636,504	1,239,612,869
Kab. Kuningan	1,243,359,240	818,927,927	1,148,735,374
Kab. Majalengka	1,167,367,010	1,127,919,598	1,148,956,857
Kab. Pangandaran	568,022,063	508,879,144	521,916,224
Kab. Purwakarta	889,747,462	810,270,915	825,439,607
Kab. Subang	1,323,634,343	1,198,944,800	1,221,080,162
Kab. Sukabumi	1,654,343,840	1,494,698,266	1,540,373,990
Kab. Sumedang	1,180,828,452	1,065,253,951	1,093,941,300
Kab. Tasikmalaya	1,508,324,968	1,381,192,559	1,511,832,760
Kota Bandung	1,798,102,095	1,589,628,887	1,617,852,903
Kota Banjar	386,560,916	351,736,779	358,176,982
Kota Bekasi	1,265,997,762	1,147,628,323	1,256,314,900
Kota Bogor	838,948,449	762,556,115	776,739,453
Kota Cimahi	598,700,744	539,717,972	547,976,205

Kota Cirebon	593,145,833	545,286,189	554,276,295
Kota Depok	950,369,136	843,978,499	871,603,788
Kota Sukabumi	519,590,243	471,842,967	478,905,738
Kota Tasikmalaya	829,431,434	753,316,752	766,651,766
Prov. Jawa Barat	3,212,647,404	2,964,612,155	3,107,449,500

Sumber : Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.2. Dana Alokasi Umum tertinggi di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2021 terjadi pada Kabupaten Bandung dengan DAU sebesar Rp. 1,947,251,242.00. Kemudian diposisi kedua disusul oleh Kabupaten Bogor dengan DAU sebesar Rp. 1,924,846,835.00. Pada peringkat tertinggi ketiga ada Kabupaten Garut dengan DAU sebesar Rp. 1,665,908,667.00. Sedangkan, Kota Banjar menjadi Kota terendah dengan DAU sebesar Rp. 358,176,982.00.

Menurut Muhammad Ridwan Manulusi, Dkk (2021). Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor penentu meningkat tidaknya Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Menurut Meilita Lukitasar, Dkk (2016). Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, walaupun, sebagian besar masih bergantung pada pengalokasian dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, namun memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus.

**Tabel 1.3. Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2021**

Wilayah Jawa Barat	Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu)		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	710,455,260.00	677,927,471.00	738,962,566.00
Kab. Bandung Barat	427,951,346.41	392,222,286.62	409,396,371.00
Kab. Bekasi	337,156,824.01	304,635,428.96	317,014,471.25
Kab. Bogor	744,504,933.10	727,767,631.00	380,052,743.00
Kab. Ciamis	525,684,724.49	430,646,331.13	469,590,028.00
Kab. Cianjur	564,171,044.97	521,073,474.11	536,430,105.00
Kab. Cirebon	547,639,575.00	496,783,928.00	378,647,987.29
Kab. Garut	767,510,693.00	678,908,094.68	695,410,945.00
Kab. Indramayu	509,076,175.00	414,909,927.00	460,716,368.00
Kab. Karawang	509,130,982.04	428,454,098.70	517,388,618.00
Kab. Kuningan	442,161,942.00	441,815,049.88	492,735,937.00
Kab. Majalengka	433,231,749.18	420,882,702.03	481,540,547.00
Kab. Pangandaran	244,214,374.76	167,972,483.32	197,400,315.62
Kab. Purwakarta	265,373,895.32	273,869,230.00	351,098,114.00
Kab. Subang	430,997,009.22	416,938,976.91	486,229,318.00
Kab. Sukabumi	590,116,845.17	253,636,790.04	611,898,749.00
Kab. Sumedang	474,761,839.17	465,666,387.70	471,889,352.63
Kab. Tasikmalaya	595,017,144.00	534,969,179.08	587,392,144.05
Kota Bandung	437,199,095.34	457,498,929.08	522,458,471.00
Kota Banjar	68,183,260.91	69,157,831.00	77,938,408.00
Kota Bekasi	290,912,555.46	302,532,232.69	315,785,050.00
Kota Bogor	189,891,533.00	195,601,128.20	126,285,842.00
Kota Cimahi	141,976,098.98	160,457,085.90	143,784,767.00

Kota Cirebon	265,373,895.32	182,779,217.05	158,769,201.00
Kota Depok	193,686,735.46	219,135,757.00	217,014,543.15
Kota Sukabumi	135,773,658.00	144,643,082.00	162,049,273.00
Kota Tasikmalaya	257,250,616.43	239,324,801.24	284,999,481.00
Prov. Jawa Barat	10,018,939,410.78	10,853,697,316.00	11,325,013,744.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dapat dilihat pada tabel 1.3. Dana Alokasi khusus tertinggi di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2021 yaitu Kabupaten Bandung dengan DAK sebesar Rp. 738,962,566.00. Kemudian diperingkat kedua disusul oleh Kabupaten Garut dengan DAK sebesar Rp. 695,410,945.00 dan diperingkat tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 611,898,749.00. Sedangkan, Kota Banjar menjadi kota dengan DAK terendah yaitu sebesar Rp. 77,938,408,00.

Menurut Fera Nur Ariyanti Ibrahim dan Irawati Abdul (2019), Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi. Setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengurangi Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi. Menurut Muhammad Ridwan Manulusi, Dkk (2021), Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Khusus bukan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi.

Dalam melaksanakan realisasi anggaran keuangan daerah, perlu memperhatikan peraturan pemerintah. Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut. Pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun kegiatan tersebut dengan menyusun cara pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 50 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) untuk memantau kegiatan tersebut agar pemanfaatannya mencapai tujuan yang diinginkan.

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal juga termasuk bentuk alokasi dana. Belanja Modal sebagai bagian dari belanja daerah untuk membangun dan menyediakan sarana, prasarana, infrastruktur serta fasilitas publik dengan membeli barang berwujud berupa asset tetap dengan imbal hasil lebih dari satu tahun (Standar Akutansi Pemerintah, SAP).

Tabel 1.4. Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu)		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	1,088,249,765.00	733,918,712.00	623,988,499.00
Kab. Bandung Barat	338,001,326.88	465,456,844.58	539,221,647.50
Kab. Bekasi	954,900,806.87	670,123,926.25	1,051,025,628.76
Kab. Bogor	1,567,693,720.67	1,488,950,260.00	1,455,148,342.00
Kab. Ciamis	520,316,832.77	416,800,356.46	497,368,772.93
Kab. Cianjur	690,653,593.57	384,911,926.93	220,177,535.56
Kab. Cirebon	587,833,749.00	296,952,046.00	226,302,824.57
Kab. Garut	1,092,730,272.61	360,370,197.83	611,653,664.02
Kab. Indramayu	982,685,411.00	317,734,106.00	420,645,079.00

Kab. Karawang	704,170,848.16	277,221,396.94	704,628,329.71
Kab. Kuningan	251,909,010.49	378,703,766.81	214,987,550.74
Kab. Majalengka	643,663,697.86	792,443,784.76	882,946,833.26
Kab. Pangandaran	499,054,520.07	464,677,932.69	276,309,118.43
Kab. Purwakarta	329,288,710.10	226,211,068.52	219,296,340.75
Kab. Subang	458,838,832.53	257,946,985.19	306,959,633.20
Kab. Sukabumi	603,895,033.57	449,098,859.24	529,714,121.62
Kab. Sumedang	605,698,351.01	498,497,676.05	114,000,775.50
Kab. Tasikmalaya	636,907,994.00	567,241,059.92	236,678,104.55
Kota Bandung	1,179,429,469.42	558,480,387.62	823,450,911.37
Kota Banjar	208,991,724.83	125,226,082.00	57,178,008.00
Kota Bekasi	1,080,944,259.34	756,293,237.42	1,208,839,407.46
Kota Bogor	501,033,406.02	276,157,283.03	311,834,421.97
Kota Cimahi	260,337,997.57	278,881,924.00	174,276,636.70
Kota Cirebon	269,915,807.93	294,349,725.45	114,308,035.95
Kota Depok	926,089,374.33	705,054,247.04	815,133,127.52
Kota Sukabumi	192,377,947.00	133,836,075.00	121,230,431.02
Kota Tasikmalaya	445,498,342.15	321,922,174.80	153,912,136.00
Prov. Jawa Barat	2,530,347,542.36	1,672,906,514.00	3,207,473,351.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dapat dilihat pada tabel 1.4. alokasi belanja modal tertinggi di Jawa Barat selama periode 2019-2021 adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah belanja modal sebesar Rp. 1,445,148,342.00. Kemudian diikuti pada posisi kedua oleh Kota Bekasi dengan jumlah alokasi belanja modal sebesar Rp. 1,208,839,407.46 dan diposisi tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Bekasi dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 1,051,025,628.76. Sedangkan, Kota Banjar menjadi Kota dengan alokasi belanja modal terendah yaitu sebesar Rp. 57,178,008.

Menurut Ni Made Nopiani, Dkk (2016), Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Buleleng Tahun 2009-

2013. Hal ini berarti Belanja Modal berperan secara langsung dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Buleleng.

Menurut perspektif Ekonomi Syariah terdapat faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yaitu penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Tidak hanya disalurkan untuk meningkatkan konsumsi saja tetapi dana ZIS juga dapat dikembangkan menjadi modal kerja yang dapat membantu meningkatkan pendapatan golongan 8 ashnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil).

Tabel 1.5. Dana Zakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Zakat Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu)		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	2,998,442,618.00	3,217,920,441.00	3,704,173,403.00
Kab. Bandung Barat	2,032,498,750.00	3,464,241,323.00	3,239,243,036.00
Kab. Bekasi	13,153,165,158.00	13,735,479,226.00	14,503,132,072.00
Kab. Bogor	5,084,146,990.00	7,796,922,401.00	8,735,060,555.00
Kab. Ciamis	4,438,839,247.00	4,782,723,131.00	4,569,954,123.00
Kab. Cianjur	3,620,591,240.00	2,850,267,220.00	2,663,701,638.00
Kab. Cirebon	2,283,754,999.00	11,199,708,108.00	12,858,971,928.00
Kab. Garut	5,818,427,791.00	8,354,743,682.00	9,058,959,488.00
Kab. Indramayu	7,382,996,667.00	7,639,791,253.00	7,304,588,146.00
Kab. Karawang	2,958,995,127.00	3,260,858,850.00	2,705,473,683.00
Kab. Kuningan	2,578,096,637.00	2,731,079,650.00	2,623,732,572.00
Kab. Majalengka	7,038,831,006.00	7,381,819,392.00	3,957,791,385.00
Kab. Pangandaran	1,109,432,050.00	1,388,002,474.00	830,646,502.00
Kab. Purwakarta	2,246,150,858.00	4,498,090,187.00	3,028,805,526.00
Kab. Subang	610,500,911.00	536,075,832.00	1,756,836,080.00
Kab. Sukabumi	15,265,965,737.00	15,802,397,717.00	15,838,519,857.00
Kab. Sumedang	9,236,146,921.00	8,623,842,406.00	9,324,613,438.00
Kab. Tasikmalaya	4,561,719,015.00	7,143,634,021.00	7,960,466,432.00
Kota Bandung	26,157,465,833.00	24,593,905,289.00	21,445,481,821.00
Kota Banjar	4,973,781,370.00	4,629,872,618.00	5,486,665,824.00
Kota Bekasi	10,292,331,454.00	9,734,682,104.00	13,608,015,691.00
Kota Bogor	4,563,029,201.00	4,429,822,318.00	5,600,110,716.00

Kota Cimahi	3,303,067,500.00	3,028,318,798.00	3,341,921,179.00
Kota Cirebon	1,022,699,567.00	1,666,325,495.00	1,927,312,325.00
Kota Depok	3,480,169,474.00	4,125,321,709.00	5,137,747,399.00
Kota Sukabumi	3,103,134,872.00	3,493,208,733.00	5,121,762,378.00
Kota Tasikmalaya	5,396,413,872.00	4,052,590,702.00	4,158,347,060.00
Prov. Jawa Barat	24,278,972,255.00	32,388,878,330.90	35,661,739,097.00

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.5. alokasi dana zakat tertinggi di Jawa Barat selama periode 2019-2021 adalah Kota Bandung dengan jumlah zakat sebesar Rp. 21,445,481,821. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukabumi dengan jumlah zakat sebesar Rp. 15,838,519,857 dan posisi tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Bekasi dengan jumlah zakat sebesar Rp. 14,503,132,072. Sedangkan, Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten dengan jumlah zakat terendah yaitu sebesar Rp. 830,646,502.

Zakat dapat membuat kegiatan ekonomi masyarakat semakin hidup. Oleh karena itu, semakin tinggi zakat yang kita keluarkan, semakin tinggi Pendapatan Nasional kita dan negara kita akan semakin sejahtera. Fakta sejarah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara hingga tercipta kemakmuran. Pada masa Umar bin Abdul Aziz perlu dicontoh dalam sistem pemerintahannya, terutama yang berkaitan dengan zakat dan sistem perpajakan. Selain itu, baik teori konseptual maupun empiris memahami bagaimana zakat sebenarnya dapat meningkatkan Pendapatan Nasional yaitu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Untuk mencapai peningkatan tersebut Zakat harus dialokasikan dan diberdayakan dengan baik.

Tabel 1.6. Dana Infaq/Shadaqoh Kabupaten/Kota**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Infaq/Shadaqoh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Ribu)		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	700,015,140.00	775,861,368.00	480,590,351.00
Kab. Bandung Barat	24,681,560.00	34,165,089.00	35,764,050.00
Kab. Bekasi	303,488,309.00	136,697,448.00	639,414,647.00
Kab. Bogor	341,322,468.00	468,843,448.00	801,923,488.00
Kab. Ciamis	2,676,721,808.00	3,474,865,932.00	6,426,076,262.00
Kab. Cianjur	2,393,567,305.00	1,395,177,964.00	2,522,834,495.00
Kab. Cirebon	269,901,795.00	150,398,750.00	196,893,198.00
Kab. Garut	1,610,261,206.00	1,000,489,350.00	1,235,885,745.00
Kab. Indramayu	3,940,481,862.00	2,008,496,931.00	2,902,536,648.00
Kab. Karawang	353,066,192.00	161,345,235.00	123,389,700.00
Kab. Kuningan	1,107,300,368.00	904,027,742.00	1,335,348,394.00
Kab. Majalengka	98,998,113.00	89,223,264.00	35,482,072.00
Kab. Pangandaran	4,567,602,350.00	1,393,421,734.00	1,169,616,590.00
Kab. Purwakarta	196,488,854.00	135,178,935.00	988,601,716.00
Kab. Subang	969,036,750.00	794,217,250.00	709,347,388.00
Kab. Sukabumi	2,697,665,411.00	2,798,456,732.00	2,590,752,937.00
Kab. Sumedang	1,754,580,654.00	1,854,797,017.00	3,020,907,820.00
Kab. Tasikmalaya	180,031,394.00	196,063,089.00	551,462,094.00
Kota Bandung	348,589,246.00	584,967,862.00	843,211,753.00
Kota Banjar	38,454,058.00	63,102,179.00	54,545,013.00
Kota Bekasi	688,909,559.00	335,261,562.00	410,445,960.00
Kota Bogor	760,544,262.00	835,118,433.00	612,921,819.00
Kota Cimahi	10,000,000.00	9,849,081.00	16,196,000.00
Kota Cirebon	394,037,924.00	297,244,488.00	660,128,927.00
Kota Depok	647,180,710.00	349,926,917.00	925,061,112.00
Kota Sukabumi	497,098,684.00	155,662,009.00	315,315,159.00
Kota Tasikmalaya	308,400,774.00	122,000,000.00	216,037,900.00
Prov. Jawa Barat	1,427,720,524.00	834,126,220.00	1,810,877,818.00

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat

Pada tabel 1.6. menunjukkan bahwa alokasi dana infaq/shadaqoh tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Ciamis

dengan jumlah infaq/shadaqoh sebesar Rp. 6,426,076,262. Kemudian, diposisi kedua tertinggi yaitu Kabupaten Sumedang dengan jumlah infaq/shadaqoh sebesar Rp. 3,020,907,820. Dan posisi tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Indramayu dengan jumlah infaq/shadaqoh sebesar Rp. 2,902,536,648.. Kota Cimahi menjadi jumlah infaq/shadaqoh terendah sebesar Rp. 16,196,000.

Menurut Muslihatul Badriyah dan Eris Munandar (2021), Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode tahun 2010-2019.

Selain Zakat, Infaq dan Sadeqah (ZIS) wakaf uang juga berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi. Wakaf berperan penting dalam pembangunan. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah saja tetapi, wakaf juga berperan penting sebagai dana abadi masyarakat untuk mensejahterakan sosial sekaligus mendorong Pertumbuhan Ekonomi negara. Gerakan wakaf di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan Republik Indonesia oleh masyarakat Aceh berupa pembelian pesawat pertama Republik Indonesia, kemudian menjadi cikal bakal Garuda Indonesia.

Di Indonesia ZIS mencapai RP. 217,3 triliun pertahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Potensi umat islam dalam Pertumbuhan Ekonomi sangat besar, namun pada kenyataannya umat islam dalam bidang ekonomi selalu terasingkan. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi wakaf yng sangat tinggi. Selain harta dan benda, wakaf juga bisa diperoleh dari nilai yang lebih

produktif yaitu wakaf uang. Bila 50 juta penduduk muslim Indonesia mau berwakaf Rp. 100.000 perbulan. Maka, wakaf uang yang terkumpul pertahun mencapai Rp. 60 triliun pertahun.

Angka pertumbuhan penduduk dapat dinilai positif atau negatif tergantung kepada tujuan pembangunan yang diambil oleh suatu negara. Di pandang positif jika suatu negara membutuhkan jumlah penduduk dalam jumlah banyak untuk menggali potensi sosial, ekonomi, maupun politik negara itu. Sebaliknya dipandang negatif jika angka pertumbuhan penduduk tersebut dinilai menghambat pembangunan atau bahkan membahayakan pembangunan. Sehingadari pandangan positif atau negatif terhadap penduduk, ada negara yang mengambil kebijakan pronatalis yang mendukung pertumbuhan penduduk dan ada pula negara yang mengambil kebijakan antinatalis yang berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk

Pemerintah Indonesia sejak 1967 dalam rangka melaksanakan pembangunan mengambil langkah kebijakan antinatalis antara lain sarannya menekan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sejak saat itu pemerintah membentuk lembaga khusus di bawah koordinasi menteri untuk menerapkan program keluarga berencana, dengan melembagakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang bermottokan “dua anak cukup” dibawah ini merupakan kondisi penduduk jawa barat tahun 2014 -2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat Tahun 2017 -2021

Melihat gambar 1.1. jumlah penduduk provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2017 – 2020 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sangat drastis. Dikarenakan di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami fenomena covid sehingga berdampak kepada jumlah penduduk di Jawa Barat.

Pada tanggal 21 Januari 2021 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei penduduk 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia per-September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari survei penduduk 2010.

Kontribusi penambahan penduduk paling besar disumbangkan Jawa Barat mencapai lebih dari 5,25 juta jiwa, diikuti Jawa Tengah sebanyak 4,13 juta

jiwa, dan Jawa Timur sebanyak 3,18 juta jiwa. Namun secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan dari tahun 2010 sebesar 1,49% menjadi 1,25%. (<https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020-peluang-indonesia-maksimalkan-bonus-demografi>)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang mana Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat keempat di Indonesia, selain itu didalam penelitian ini dilihat bagaimana pengaruh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS dan Jumlah Penduduk. Serta seberapa besar pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, terkait dengan analisis Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Dana ZIS dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.